

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2018-2020

Hilda Rizqi Amalia<sup>1</sup>, Berlina Yudha Pratiwi<sup>\*</sup>

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia

<sup>\*</sup>Korespondensi: berlina\_y@polije.ac.id

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the financial performance of the Banyuwangi Regency Government in 2018 to 2020 using financial ratio analysis. This research design uses descriptive qualitative. The population and samples taken are the 2018-2020 Banyuwangi Regional Government Financial Reports. Data were obtained by means of documentation, and literature study. The results show that the financial performance of the Banyuwangi Regency Government in the ratio analysis of the degree of decentralization in 2018-2020 shows less. In the analysis of the ratio of regional financial dependence in 2018-2020 is very high. In the analysis of the ratio of regional financial independence in 2018-2020 it is very low. In the analysis of the effectiveness ratio of regional original income (PAD) the average 2018-2020 shows less effective. In the 2018-2020 PAD efficiency analysis, it is very efficient. In the analysis of the compatibility ratio for 2018-2020, it shows that the amount of funds owned for operating expenses is 78.84% while operating expenses is 20.06%. The analysis of the growth ratio in 2018-2020 is fluctuating.*

**Keywords:** Financial Statements, Financial Performance, Ratio Analysis

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018 sampai 2020 dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Rancangan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Populasi dan sampel yang diambil adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 2018-2020. Data diperoleh dengan cara dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada analisis rasio derajat desentralisasi tahun 2018-2020 menunjukkan kurang. Pada analisis rasio ketergantungan keuangan daerah tahun 2018 - 2020 sangat tinggi. Pada analisis rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2018-2020 rendah sekali. Pada analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata tahun 2018-2020 menunjukkan kurang efektif. Pada analisis efisiensi PAD tahun 2018-2020 sangat efisien. Pada analisis rasio keserasian tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa besar dana yang dimiliki untuk belanja operasi sebesar 78,84% sedangkan belanja operasi 20,06%. Analisis rasio pertumbuhan tahun 2018-2020 bersifat fluktuatif.

**Kata kunci:** Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Analisis Rasio

## PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik saat ini berkembang sangat pesat dengan adanya penerapan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sudah mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sentralistik merupakan pemberlakuan kekuasaan oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralistik merupakan pemberian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan secara mandiri atau biasa disebut otonomi daerah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan negara sudah tidak terpusat lagi di pemerintah pusat, akan tetapi dapat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Otonomi daerah menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah diharapkan sebagai wadah dalam mengimplementasikan tujuan pemerintah pusat dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan lebih memahami kebutuhan masyarakat daerahnya, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan adanya otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengelola dan mengembangkan potensi daerah masing-masing agar menjadi daerah yang mandiri. Anggapan tersebut dikarenakan, pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga lebih mengetahui potensi dan kebutuhan dari masyarakatnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menjadi tolok ukur dalam menilai performa keuangan pemerintah daerah, karena anggaran bisa menjadi gambaran kedapatan pemerintah daerah dalam mengelola kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah. Hasil penelitian Ropa (2016) menyatakan bahwa salah satu cara mengukur performa keuangan pemerintah daerah yakni melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditentukan.

Menurut Mahmudi (2019), analisis rasio keuangan adalah perbandingan antara dua aspek data yang berasal dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan berdasarkan laporan realisasi APBD digunakan untuk mengetahui seberapa besar kegiatan pemerintah dalam melakukan pengeluaran pendapatan, menilai seberapa besar tingkat kemandirian dalam menggunakan dana transfer, mengukur performa dalam realisasi pendapatan asli daerah, serta untuk melihat perkembangan penerimaan pendapatan dan tingkat pengeluaran yang dilakukan selama satu periode. Menurut Mahmudi (2019) performa keuangan pemerintah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Kerasian, dan Rasio Pertumbuhan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Jawa Timur yang diberikan kekuasaan secara luas dan diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintah dari pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan terhadap perkembangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 1.1 di bawah, dapat diketahui permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Banyuwangi antara lain yaitu tingkat ketergantungan dana transfer pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat selama kurun waktu 2018-2020 pendapatan transfer yang diterima Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi dari tahun ke

tahun. Permasalahan lain yang dihadapi adalah rendahnya kedapatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang seharusnya dapat dioptimalkan sehingga penerimaan PAD relatif sangat rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer.

**Tabel 1. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016-2020**

Tahun	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan Daerah
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain PAD yang Sah	
2018	Rp450.066.949.215,18	Rp2.416.047.253.365,00	Rp131.529.815.766,36	Rp2.997.644.018.346,54
2019	Rp495.691.172.682,08	Rp2.521.085.575.825,00	Rp126.505.875.606,25	Rp3.143.282.624.113,33
2020	Rp482.740.174.377,22	Rp2.339.531.673.666,00	Rp445.959.400.929,01	Rp3.268.231.248.972,23

Sumber: BPKAD Kabupaten Banyuwangi (2021)

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menurut Sugiyono (2017) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang terjadi secara alamiah adanya perubahan apapun. Peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan atau menggambarkan obyek atau hasil penelitian. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil analisis rasio keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat diketahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018-2020.

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sehingga, sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2018-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Adapun cara analisis yang dilakukan yaitu menghitung rasio keuangan, membuat grafik, melakukan komparasi dan analisa terhadap hasil perhitungan rasio keuangan, dan menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi adalah rasio yang menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Menurut Mahmudi (2019) Rasio Derajat desentralisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

**Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2018	450.066.949.215,18	2.997.644.018.346,54	15,01	Kurang
2019	495.691.172.682,08	3.143.282.624.113,33	15,77	Kurang
2020	482.740.174.377,22	3.268.231.248.972,23	14,77	Kurang
<b>Rata-Rata</b>			<b>15,18</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Menurut Mahmudi (2019) Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Keterangan
2018	2.416.047.253.365,00	2.997.644.018.346,54	80,60	Sangat Tinggi
2019	2.521.085.575.825,00	3.143.282.624.113,33	80,21	Sangat Tinggi
2020	2.339.531.673.666,00	3.268.231.248.972,23	71,58	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata</b>			<b>77,46</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah. Semakin besar angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pengeluarannya (Mahmudi, 2019). Menurut Mahmudi (2019) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	Transfer Pemerintah Provinsi (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Keterangan	Pola Hubungan
2018	450.066.949.215,18	2.203.199.795.537,00	212.847.457.828,00	218.907.793.368,65	17,08	Rendah Sekali	Instruktif
2019	495.691.172.682,08	2.277.156.675.363,00	243.928.900.462,00	35.950.000	19,66	Rendah Sekali	Instruktif
2020	482.740.174.377,22	2.157.953.688.002,00	181.577.985.664,00	0	20,63	Rendah Sekali	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>					<b>19,12</b>	<b>Rendah Sekali</b>	<b>Instruktif</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menggambarkan kedapatan pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan PAD sesuai target yang ditetapkan sebelumnya (Mahmudi, 2019). Sedangkan rasio efisiensi PAD adalah rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi performa pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2019) Rasio efektivitas dan efisiensi PAD dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 5. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kriteria
2018	450.066.949.215,18	624.174.973.802,82	72,11	Tidak Efektif
2019	495.691.172.682,08	517.576.991.597,46	95,77	Cukup Efektif
2020	482.740.174.377,22	565.194.392.512,52	85,41	Kurang Efektif
<b>Rata-Rata</b>			<b>84,43</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

**Tabel 6. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020**

Tahun	Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	Kriteria
2018	1.998.061.824,00	450.066.949.215,18	0,44	Sangat Efisien
2019	3.999.722.664,00	495.691.172.682,08	0,81	Sangat Efisien
2020	-	432.740.174.377,22	0,00	Sangat Efisien
<b>Rata-Rata</b>			<b>0,42</b>	<b>Sangat Efisien</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Rasio Keserasian

Rasio keserasian merupakan rasio yang menjelaskan mengenai keseimbangan antarbelanja. Menurut Mahmudi (2019) Analisis rasio keserasian diantaranya terdiri dari yaitu Analisis Belanja Operasi dan Analisis Belanja terhadap Total Belanja. Menurut Mahmudi (2019) Analisis belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

**Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020**

Tahun	Realisasi Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Operasi (%)
2018	1.945.420.887.034,24	2.425.803.550.332,60	80,20
2019	2.087.908.048.366,24	2.617.746.803.662,13	79,76
2020	2.102.953.113.847,04	2.746.572.574.168,47	76,57
<b>Rata-rata</b>			<b>78,84</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

**Tabel 8. Rasio Keserasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018–2020**

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Keserasian Belanja Modal (%)
2018	480.382.663.298,36	2.425.803.550.332,60	19,80
2019	529.542.999.045,89	2.617.746.803.662,13	20,23
2020	553.395.030.040,43	2.746.572.574.168,47	20,15
<b>Rata-rata</b>			<b>20,06</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menilai tingkat kedapatan pemerintah untuk mempertahankan dan juga meningkatkan hasil yang dicapai untuk periode kedepannya. Menurut Mahmudi (2019) Analisis rasio pertumbuhan terdiri dari Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Analisis Pertumbuhan Belanja. Menurut Mahmudi (2019) Analisis pertumbuhan pendapatan dan belanja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th t} - \text{Pendapatan Th (t-1)}}{\text{Pendapatan Th (t-1)}}$$

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Th t} - \text{Realisasi Belanja Th (t-1)}}{\text{Realisasi Belanja Th (t-1)}}$$

**Tabel 9. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 – 2020**

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan Pendapatan (%)
2018	2.997.644.018.346,54	9,72
2019	3.143.282.624.113,33	4,86
2020	3.268.231.248.972,23	3,97
<b>Rata-rata</b>		<b>6,18</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

**Tabel 10. Analisis Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018 – 2020**

Tahun	Belanja Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah (Rp)
2018	2.425.803.550.332,60	-0,63
2019	2.617.746.803.662,13	7,91
2020	2.746.572.574.168,47	4,92
<b>Rata-rata</b>		<b>4,07</b>

Sumber: BPKAD Kab. Banyuwangi, 2022 (data diolah)

### Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan memakai rasio derajat desentralisasi selama tahun 2018 – 2020 dikategorikan kurang dapat dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini disebabkan karena total pendapatan asli daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 – 2020 masih terlalu rendah dari total pendapatan daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum dapat dalam mengelola dan menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya atau masih rendah dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri.



### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018-2020 tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena total pendapatan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018-2020 hampir keseluruhannya berasal dari pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dalam hal ini, kontribusi pendapatan asli daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih sangat rendah karena penerimaan pendapatan transfer masih sangat tinggi atau mendominasi, yang artinya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum optimal dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang ada di daerahnya karena masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 tingkat kemandirian keuangan daerahnya rendah sekali karena pendapatan asli daerah yang diterima lebih kecil dari pendapatan transfer baik transfer pusat dan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Banyuwangi masih mengandalkan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah pusat memiliki peranan yang lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki di daerahnya sehingga kontribusi pendapatan asli daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan transfer. Berdasarkan pola hubungan rasio kemandirian Kabupaten Banyuwangi termasuk pada pola instruktif, dimana dana transfer dari pemerintah pusat lebih dominan daripada PAD daerah Kabupaten Banyuwangi, serta ketergantungan dana untuk operasional daerah lebih tergantung pada besaran APBN yang pemerintah pusat berikan kepada daerah. Berdasarkan data diketahui bahwa bantuan pemerintah masih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan rasio efektivitas PAD diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 dikatakan kurang efektif karena pendapatan asli daerah yang terealisasi masih rendah atau belum sesuai dengan yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan target penerimaan belum sesuai dan belum dapat merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerahnya. Sedangkan, berdasarkan rasio efisiensi diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 dikatakan sangat efisien karena untuk memperoleh PAD biaya yang dikeluarkan kecil atau biaya pemungutan PAD lebih rendah dari realisasi penerimaan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat efisien dalam melakukan pemungutan PAD.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Keserasian**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 dengan menggunakan rasio belanja operasi terhadap total belanja

diketahui bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih banyak digunakan untuk belanja operasi dibandingkan untuk belanja modal. Namun, dalam pengelolaan belanja operasi dan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha memaksimalkan pada belanja modal dengan memanfaatkan anggaran untuk kepemilikan aset tetap sebagai sumber penerimaan PAD dalam wujud aset tetap yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sedangkan, berdasarkan rasio belanja modal terhadap total belanja diketahui bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk belanja modal lebih kecil dibandingkan untuk belanja operasi. Akan tetapi, apabila dilihat dari rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja tahun 2018 - 2020 sebesar 20,06% dapat dikatakan tinggi karena pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja adalah 5 - 20 persen.

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Rasio Pertumbuhan**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 dengan menggunakan analisis pendapatan daerah diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan daerah yang mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Apabila dilihat dari data diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan cenderung menurun atau negatif. Dalam hal ini, kinerja pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak dapat dipertahankan peningkatannya karena cenderung mengalami penurunan. Sedangkan, berdasarkan analisis pertumbuhan belanja daerah diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan belanja positif. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus dapat mengendalikan belanja daerah yang dikeluarkan karena selama tahun 2018-2020 pertumbuhan belanjanya mengalami fluktuatif.

Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dapat dikaitkan dengan hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat (Halim, 2014). Penerimaan pendapatan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima oleh Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut tidak terlepas dari peran masyarakat dalam memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah dengan membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), dalam hal ini masyarakat berperan sebagai prinsipal. Sebaliknya pemerintah daerah sebagai agen harus mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang telah diberikan dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sebagai prinsipal telah menyediakan sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah sebagai agen.

### **SIMPULAN**

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 - 2020 dengan berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi masuk dalam kriteria kurang dengan presentase rata-rata sebesar 15,18. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berada dalam kriteria sangat tinggi dengan presentase rata-rata 77,46%. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berada dalam kriteria rendah sekali dengan presentase rata-rata 19,12%. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berada dalam kriteria kurang efektif dan sangat efisien dengan presentase rata-rata 84,43% dan 0,42%. Rasio keserasian



belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi masih memprioritaskan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil yang fluktuatif dari tahun 2018-2020, serta rasio pertumbuhan belanja cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 yang harus di audit, peneliti tidak dapat menggali data kepada pegawai pengelola keuangan secara langsung akan tetapi hanya bisa dilakukan secara *online*. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambah rasio yang digunakan seperti *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang digunakan untuk menaksir kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah atau rasio derajat kontribusi BUMD.

## DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 203 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- . 12 Maret 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mutiha, A.H. 2016. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 - 2014". *Jurnal Vokasi Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Pandjaitan, M.F., Tommy, P., and Untu, V.N. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2011-2016". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Rahmayanti, A. 2019. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun Anggaran 2011-2013". *Jurnal EKA CIDA*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738-747.
- Rosaliena, V., and Zulkifli. 2019. "Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017". *Jurnal Kajian Bisnis*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Susanto, H. 2019. “*Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram*”. Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis. Universitas Terbuka Mataram.
- Zukhri, N. 2020. “*Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau Dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, Dan Desentralisasi Fiskal*”. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik. Universitas Bangka Belitung.